

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	5
1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN DENDE' PIONGAN NAPO.....	6
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	11
1.4 ASPEK STRATEGIS / RENCANA STRATEGI 2016 – 2121....	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 14
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 15
3.1 CAPAIAN KINERJA	15
3.2 REALISASI ANGGARAN	26
 BAB IV PENUTUP	 27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dende' Piongan Napo Tahun 2016-2021, ditetapkan bahwa Kecamatan Dende'Piongan Napo melaksanakan Misi V Bupati dan Wakil Toraja Utara yaitu “ **Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing**”.

- Mandiri** adalah : Kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan yang kesemuanya ditunjang oleh kondisi perekonomian secara umum serta pemenuhan insfrastruktur daerah.
- Berbudaya** adalah : Kondisi masyarakat kabupaten Toraja Utara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pada berbagai ranah kehidupan keagamaan, praktek budaya daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan tertib kehidupan masyarakat.
- Berdaya Saing** adalah : Kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang memiliki kualitas SDM yang setara dengan daerah lain, didukung oleh berbagai potensi yang menjadi daya tarik pariwisata.

Untuk mendukung ketercapaian Misi V Bupati dan Wakil Bupati tersebut Kecamatan Dende'Piongan Napo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Toraja Utara mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan publik dan Pengelolaan administrasi Pemerintahan yang efektif, dengan sasaran dan tujuan :
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan Indikator sasaran
 - Indeks pelayanan SKPD

2. Meningkatkan Akuntabilitas SKPD, dengan indikator kinerja dengan sasaran dan tujuan :
 - Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pegawai
 - Meningkatkan Akuntabilitas Keuangandengan indikator
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di Kecamatan, dengan indikator kinerja :
 - Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten.
4. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan indikator kinerja :
 - Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan;
 - Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda;
5. Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan, dengan indikator kinerja :
 - Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Dende' Piongan Napo tahun 2016-2021, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dende'Piongan Napo Tahun 2022, dari 1 Tujuan dan 3 Sasaran Strategis dan 7 Indikator Sasaran, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

- Tujuan1 terdapat 5 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja sasaran :
 - ✓ Capaian sasaran strategis 1, terdapat 3 indikator sasaran **mencapai target = 100%** atau **bermakna Baik**.
 - ✓ Capaian sasaran strategis 2, terdapat 3 indikator sasaran **mencapai target = 100 %** atau **bermakna Baik**.
 - ✓ Capaian sasaran strategis 3, terdapat 1 indikator sasaran **melebi mencapai target = 52 %** atau **bermakna sedang**.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran strategis yang mencakup 7 indikator sasaran, diketahui bahwa 6 indikator sasaran atau **100% mencapai target (Baik)**, 1 indikator sasaran atau **52 % mencapai target (Sedang)**. Realisasi capaian kinerja sasaran strategis bermakna **Baik**. Jadi capaian kinerja Kecamatan Dende'Piongan Napo tahun 2022 adalah **Baik**.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran, Kecamatan Dende'Piongan Napo mengalami hambatan/kendala. Hambatan/kendala tersebut antara lain :

- 1). kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur
- 2). kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses prosedur pelayanan. Sebagai upaya untuk mengatasi dengan mengikutsertakan aparatur kecamatan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan atau Bimtek. Melalui upaya tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin meningkat dan tepat waktu.
- 3). Kurang baiknya Akses jalan menuju ke Kantor Camat Dende' Piongan Napo yang menghubungkan mobilitas ke Kota.
3. Jaringan Internet yang tidak baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi .

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Dende'Piongan Napo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

1.2. GAMBARAN UMUM KECAMATAN DENDE'PIONGAN NAPO

Kecamatan Dende'Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan perumusan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang diserahkan Bupati sesuai peraturan yang berlaku.

Kedudukan Kecamatan Dende'Piongan Napo dalam pemerintahan Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai unsur penunjang utama urusan pemerintahan daerah dan hubungan Kecamatan Dende'Piongan Napo dengan unit kerja lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah hubungan koordinasi dalam rangka mewujudkan “ **Satu tekad untuk Kecamatan Dende'Piongan Napo yang lebih baik** “

Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan Dende'Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Kecamatan Dende' Piongan Napo adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kebijakan Daerah di bidang pelayanan kepada masyarakat.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas, Kecamatan Dende'Piongan Napo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan masyarakat;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan masyarakat;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan masyarakat;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Kecamatan Dende'Piongan Napo mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Menyusun program kerja tahunan untuk dijadikan acuan kerja;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pelayanan masyarakat;
- c. Memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas melalui disposisi atau secara lisan agar pekerjaan berjalan baik;
- d. Memberi teladan staf kepada Bupati menyangkut kebijakan urusan Pelayanan kepada masyarakat;
- e. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas pegawai kecamatan Dende'Piongan Napo;
- f. Merumuskan kebijakan teknis mengenai tugas-tugas yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memberi bimbingan/pembinaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna;
- g. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas, guna dicarikan upaya pemecahannya.
- h. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan bawahan untuk pembinaan karier;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kecamatan Dende'Piongan Napo sebagai bahan pertanggungjawaban atau bahan evaluasi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai, karena keuangan daerah merupakan salah satu faktor dalam mengukur mampu tidaknya pemerintah daerah menjalankan fungsinya, yaitu: Penyelenggarakan Pelayanan Masyarakat (*Public Service Function*), Melaksanakan Pembangunan (*Development Function*) dan Perlindungan Masyarakat (*Protective function*) sehingga kewenangan yang diserahkan kepada daerah akan disertai dengan penyerahan pembiayaan personalia, sarana dan prasarana sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Disisi lain, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melakukan penataan kewenangan kelembagaan dan personil serta merumuskan semua kewenangan dengan tetap memperhatikan kapasitas daerah dalam hal pembiayaan, selain berupaya agar daerah menerima sumber penerimaan yang memadai melalui Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka daerah mampu menggali sumber-sumber pendapatan sendiri, sehingga nantinya daerah mampu melaksanakan semua urusan yang telah menjadi kewenangannya dengan baik. Disamping itu, Daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan pelaksanaan Otonomi Daerah itu sendiri.

Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan setiap pimpinan unit kerja termasuk Kecamatan Dende'Piongan Napo diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui Laporan Kinerja Instansinya masing-masing pada setiap tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta merupakan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Secara administratif Kecamatan Dende'Piongan Napo mempunyai batas daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kapalapitu dan Sopai;
2. Sebelah Timur : Kecamatan Sopai dan Kab.Tana Toraja
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Kab. Tana Toraja
4. Sebelah Barat : Kecamatan Awan Rantekarua

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Dende'Piongan Napo terbagi atas 1 Kelurahan dan 7 Lembang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Pasang
2. Lembang Kapolang
3. Lembang Piongan
4. Lembang Dende'
5. Lembang Paku
6. Lembang Ma'dong
7. Lembang Buntu Tagari
8. Lembang Parinding

Tabel 1.1
Jumlah Kelurahan/Lembang Kecamatan Dende'Piongan Napo

No.	Kelurahan / Lembang	Jumlah Dusun / Kampung /RW
1.	Kelurahan Pasang	4
2.	Lembang Kapolang	4
3.	Lembang Piongan	5
4.	Lembang Dende'	4
5.	Lembang Paku	5
6.	Lembang Ma'dong	4
7.	Lembang Buntu Tagari;	4
8.	Lembang Parinding	4
JUMLAH		34

Tabel 1.2
Pegawai Kecamatan dan Kelurahan/Lembang berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	1 Orang
2.	Golongan III	6 Orang
3.	Golongan II	3 Orang
	Jumlah	10 Orang

Tabel 1.2

Pegawai Kecamatan dan Kelurahan/Lembang berdasarkan Jabatan/Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon III/A	1 Orang
2.	Eselon III/B	1 Orang
3.	Eselon IV/A	5 Orang
4.	Eselon IV/B	-
	Jumlah	7 Orang

Tabel 1.2

Pegawai Kecamatan dan Kelurahan/Lembang berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S.2	2 Orang
2.	S.1	5 Orang
4.	SLTA Sederajat	3 Orang
	Jumlah	10 Orang

1.4. ASPEK STRATEGIS / RENSTRA STRATEGIS 2016 - 2021

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan aspek dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Dende 'Piongan Napo pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan aspek pembangunan Kabupaten Toraja Utara.

Secara umum, Aspek dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan alur pelayanan;
- d. Tingginya pelayanan masyarakat yang harus ditangani/diselesaikan;
- e. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang semakin meningkat harus dipertahankan;
- f. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan sering terkendala oleh ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.
- g. Kurang baiknya akses jalan menuju Kantor Camat Dende' Piongan Napo yang dapat menghambat Pelayanan.

Aspek strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan

Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dende' Piongan Napo, sebagai berikut :

- a. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- b. Membangun komitmen sumber daya aparatur sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja;
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur dan alur pelayanan;
- d. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan;
- f. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan program-program yang masih belum optimal bersama instansi terkait :

BAB II**PERENCANAAN KINERJA**

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik di Kecamatan Dende' Piongan Napo

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Dende' Piongan Napo	%	100
2	Rata-rata capaian kinerja pelayanan untuk kewenangan yang dilimpahkan (PPATS + PBB + Perijinan Usaha	%	100
3	Jumlah kejadian konflik social skala kecamatan	%	0

Sasaran 2: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan keberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	% Jumlah Lembang tertinggal	%	72
2	% Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan Lembang Adat Aktif	%	50
3	% Jumlah Desa dan Kelurahan dengan system administrasi pemerintah sesuai standar	%	100

Sasaran 3: Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam pencapaian kinerja pemerintah Kecamatan Dende' Piongan Napo

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Dende' Piongan Napo	%	57,30

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 CAPAIAN KINERJA 2023**

Target dan Realisasi Tahun 2023

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik di Kecamatan Dende' Piongan Napo

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Dende' Piongan Napo	%	100	100	100
2	Rata-rata capaian kinerja pelayanan untuk kewenangan yang dilimpahkan (PPATS + PBB + Perizinan Usaha	%	100	100	100
3	Jumlah kejadian konflik sosial skala kecamatan	%	0	0	100

Kualitas Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada tahun 2023 mencapai target yang diharapkan karena dalam pelaksanaan tugas pelayanana adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar atasan dan pegawai, antar pegawai dengan pegawai juga dengan stakholder terkait.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan keberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	% Jumlah Lembang tertinggal	%	72	0	100
2	Aktif% Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan Lembang Adat	%	50	50	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	% Jumlah Desa dan Kelurahan dengan system administrasi pemerintah sesuai standar	%	100	100	100

Kecamatan Denpina terdiri dari 7 Lembang semuanya sudah termasuk kategori berkembang sudah tidak ada kategori Lembang tertinggal..

Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang aktif yaitu LPMD, PPL, PKK, organisasi Pemuda dan Lembaga Adat Pendamai di Kecamatan, Kelurahan dan Lembang Kualitas Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada tahun 2023 mencapai target yang diharapkan karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik.

Sasaran 3 : Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam pencapaian kinerja pemerintah Kecamatan Dende' Piongan Napo

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Dende' Piongan Napo	%	57.30	56,75	99,04

Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada tahun 2023 mencapai target diharapkan karena adanya kerjasama yang baik namun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal karena adanya kendala-kendala yaitu jaringan internet dan akses jalan kantor ke Kecamatan.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Denpina	1.Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Dende' Piongan Napo	100	100	100
	2.Rata-rata capaian kinerja pelayanan untuk kewenangan yang dilimpahkan (PPATS + PBB + Perizinan Usaha	100	100	100
	3.Jumlah kejadian konflik sosial skala kecamatan	0	0	100
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan keberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	1.% Jumlah Lembang tertinggal	72	0	100
	2.% Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan Lembang Adat	50	50	100
	3.% Jumlah Desa dan Kelurahan	100	100	100
Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam	Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Dende' Piongan Napo	57,30	56,75	99,04

pencapaian kinerja Pemerinta Kec. Denpina				
--	--	--	--	--

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2022	2023
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Denpina	1.Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Dende' Piongan Napo	100	100	100
	2.Rata-rata capaian kinerja pelayanan untuk kewenangan yang dilimpahkan (PPATS + PBB + Perizinan Usaha	100	100	100
	3.Jumlah kejadian konflik sosial skala kecamatan	0	0	100
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan keberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	1.% Jumlah Lembang tertinggal	29	85,71	0
	2.% Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan Lembang Adat	100	100	50
	3.% Jumlah Desa dan Kelurahan	100	100	100
Terpenuhinya kebutuhan	Rata-rata capaian kinerja Kecamatan	76,56	N/A	56,75

penunjang dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kec. Denpina	Dende' Piongan Napo			
--	---------------------	--	--	--

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan Denpina	1.Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Dende' Piongan Napo	100	100	100
	2.Rata-rata capaian kinerja pelayanan untuk kewenangan yang dilimpahkan (PPATS + PBB + Perizinan Usaha	100	100	100
	3.Jumlah kejadian konflik sosial skala kecamatan	0	0	0
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan keberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	1.% Jumlah Lembang tertinggal	29	0	100
	2.% Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan Lembang Adat	100	50	50
	3.% Jumlah Desa dan Kelurahan	100	100	100
Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam	Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Dende' Piongan Napo	70,56	56,75	80,42

pencapaian kinerja Pemerinta Kecamatan Denpina				
---	--	--	--	--

Tabel 3.4

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Denpina	1.Rata-rata capaian SPM di Kecamatan Dende' Piongan Napo	100	100	100	12.145.000	7.585.000	62,45
	2.Rata-rata capaian kinerja pelayanan untuk kewenangan yang dilimpahkan (PPATS + PBB + Perizinan Usaha	100	100	100			
	3.Jumlah kejadian konflik sosial skala kecamatan	0	0	100			
Program:	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	75	75	100	12.145.000	7.585.000	62,45

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
2.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan keberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan Program: Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	1.% Jumlah Lembang tertinggal	72	0	0	212.000.00	204.040.0	96,25
	2.% Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan Lembang Adat	50	50	100			
	3.% Jumlah Desa dan Kelurahan dengan system administrasi pemerintah sesuai standar	100	100	100			
	Persentase kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	42	42	100	212.000	204.040	96,25

3.Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam pencapaian kinerja Pemerinta Kec. Denpina Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Dende' Piongan Napo	100	100	100	1.391.038.576	1.240.041.644	89,15
	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100	100	100	1.391.038.576	1.240.041.644	89,15

Tabel
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Denpina	Rata-rata capaiann SPM di Kecamatan Dende' Piongan Napo	100	62,45	37,55
		Rata-rata capaian kinerja pelayanan untuk kewenangan yang dilimpahkan (PPATS + PBB + Perizinan Usaha	100	62,45	37,55
		Jumlah kejadian konflik sosial skala kecamatan	100	62,45	37,55
2.		% Jumlah Lembang tertinggal	100	96,25	3,75

	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan keberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	.% Jumlah Organisasi kemasyarakatan % Lembang Adat	100	96,25	3,75
		.% Jumlah Desa dan Kelurahan dengan system administrasi pemerintah sesuai standar	100	96,26	3,75
3.	Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam pencapaian kinerja Pemerinta Kec. Denpina	Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Dende' Piongan Napo	100	89,15	10,85

3.2 REALISASI ANGGARAN 2023

LKjIP Kecamatan Dende'piongan Napo

KD. REKENING	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	DPA	KONTRAK	REALISASI				SISA KONTRAK	PERMASALAHAN
						KEU	FISIK (%)	KEU (%)	KINERJA		
				1.615.183.576	1.615.183.576	1.451.666.644	95,00	89,88		163.516.932	
7	URUSAN KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN DENPINA										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	1.391.038.576	1.391.038.576	1.240.041.644	53,59	89,15		150.996.932	
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			3.791.431	3.791.431	3.740.000	95,00	98,64	-	51.431	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah			3.791.431	3.791.431	3.740.000	95,00	98,64		51.431	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	97%	1.108.626.281	1.108.626.281	1.035.653.561	80,11	93,42		72.972.720	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	13 Org	1.108.626.281	1.108.626.281	1.035.653.561	80,11	93,42		72.972.720	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Dilayani	100	15.000.000	15.000.000	10.000.000	-	66,67		5.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian adat Tenun dan pakaian olahraga	50 stel	15.000.000	15.000.000	10.000.000	-	66,67		5.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	80%	36.254.500	36.254.500	18.854.500	3,34	52,01		17.400.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Listrik	1 tahun	1.020.000	1.020.000	1.020.000	100,00	100,00		-	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2 unit	15.207.000	15.207.000	13.300.000	40,00	87,46		1.907.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah yang	unit	2.405.000	2.405.000	925.000	52,22	38,46		1.480.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang	10 Keg	17.622.500	17.622.500	3.609.500	55,00	20,48		14.013.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	90%	197.589.660	197.589.660	155.913.083	30,87	78,91		41.676.577	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terselenggaranya urusan penunjang daerah	1 tahun	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00	100,00		-	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	2.091.160	2.091.160	1.409.083	53,83	67,38		682.077	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	194.198.500	194.198.500	153.204.000	35,00	79		40.994.500	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	85%	29.776.704	29.776.704	19.620.500	31,21	65,89		10.156.204	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6 unit	29.776.704	29.776.704	19.620.500	35,00	65,89		10.156.204	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	75%	12.145.000	12.145.000	7.585.000	16,21	62,45		4.560.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70	12.145.000	12.145.000	7.585.000	16,21	62,45		4.560.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan	10 keg	12.145.000	12.145.000	7.585.000	16,21	62,45		4.560.000	
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	75%	212.000.000	212.000.000	204.040.000	90,47	96,25		7.960.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terbangunnya jalan publik		212.000.000	212.000.000	204.040.000	90,47	96,25		7.960.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	terbangunnya akses jalan yang layak bagi masyarakat kelurahan	1 keg	212.000.000	212.000.000	210.040.000	90,47	99,08		1.960.000	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dende'Piongan Napo Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Kecamatan Dende'Piongan Napo dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.

LKjIP Kecamatan Dende'Piongan Napo Tahun 2023 ini menggambarkan kinerja Kecamatan Dende'Piongan Napo selama tahun 2023 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

4.1. KESIMPULAN

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Dende'Piongan Napo tahun 2022 capaian dikategorikan **Baik**. realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai **98,59%** atau bermakna **Baik**. Jadi capaian kinerja Kecamatan Dende'Piongan Napo tahun 2022 adalah **Baik**.

4.2. SARAN / MASUKAN

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Kecamatan Dende'Piongan Napo, antara lain :

- a. Mengikut sertakan aparaturnya untuk mengikuti Bimtek/Pelatihan terkait SAKIP;
- b. Semua usulan perencanaan pembangunan yang sudah disetujui di Kabupaten seharusnya terealisasi dalam pelaksanaan pembangunan;

- c. Melakukan upaya pemantauan secara rutin dan berkala pelanggaran terhadap Perda serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dan prosedur pelayanan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Dende'Piongan Napo Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat tercapai dengan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan itu semua karena semata-mata kelemahan kami. Namun demikian segala kekurangan dan kelemahan tentunya akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di tahun mendatang.

Dende', Februari 2024

Camat Dende' Piongan Napo



Marthen Maurice Sanning, S.E
NIP. 19701006 199903 1 00